

DAFTAR BACAAN

BUKU:

- Adrianto, Nico Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government, Banyumedia Publishing, Malang, 2007
- Arifin, Samsul, et. al., Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Elex Media Komputindo, Jakarta 2008
- Bovis, Christoper H, *EU Public Procurement Law* (Elgar European Law Series), Edward Elgar Publishing, 2007
- Craig, et. al., *EU Law: Text, Cases, and Materials (5th ed.)*, NY: Oxford University Press, New York 2011
- Departemen Perdagangan RI, *Buku Menuju Informasi Umum Masyarakat Ekonomi Asean*, Direktorat Jendral Perdagangan Internasional, Jakarta, 2011
- Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya 2005
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1998.
- M Hadjon, Philipus, Tatiek Sri Djatmati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Lubis, Andi Fahmi, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ, Indonesia, 2009
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Salatiga, 2002.
- Soesastro, Hadi, *Asean In A Changed Regional And International Political Economy*, Centre For Strategic And International Studies, Jakarta, 1995.
- Sue Arrowsmith et.al, “*EU Public Procurement Law : An Introduction.*” *The EU Asia Inter University Network for Teaching and Research in Public Procurement*, 2009

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Suherman, Ade Maman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003

Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Lainnya:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaann Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering

Guidelines For Government Procurement Brunei Darussalam Procurement

Government Procurement Reform Act of Philipines

Government Procurement Act Singapore

Government Procurement Act Regulation 2014 Singapore

Malaysia's Government Procurement Regime

The Asean Charter

The Law on Public Procurement No. NS/RKM/0112/004 Cambodia

Majalah Dan Surat Kabar :

Kompetisi Edisi 42 Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2013

Jurnal/Artikel

Asean Economic Blue Print

Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business 2013, ASEAN Secretariat, mycc.gov.my

Buku Informasi Umum ASEAN Economic Community, ditjenkpi.kemendag.go.id

Menuju Asean Economic Community 2015, ditjenkpi.kemendag.go.id

Sosialisasi Inpres No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No.4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010

Peluang dan Tantangan Indonesia Pada ASEAN Economic Community 2015, www.setneg.go.id

Website :

A. M. Tri Anggraini, Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran Tender, Artikel Hukum Perdata/Bisnis, ditulis pada 5 Agustus 2007, www.legalitas.org, Dikunjungi 24 April 2015

Chairil et.al, “Peluang dan Tantangan Indonesia Pada ASEAN Economic Community 2015.”, <http://www.setneg.go.id/>, 4 Juni 2007, h. 3, Dikunjungi pada tanggal 4 April 2015

European Union, *EU Treaties*, http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_en.htm, diakses pada 20 Juni 2015

European Union, “*Regulations, Directives and other acts*”, http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_en.htm, diakses pada 20 Juni 2015

Government Procurement (Application) (Amendment) Order 2014, <http://statutes.agc.gov.sg>, article 6, diakses pada 10 juni 2015

Ministry Of Finance Malaysia, Malaysia's Government Procurement Regime,
http://www.treasury.gov.my/pdf/lain-lain/msia_regime.pdf, diakses pada
8 Juni 2015

Public Procurement Reform, http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/modernising-rules/reform-proposals/index_en.htm

The Association Of Southeast Asian Nation,, " *Asean Economic Community Blue Print* ".<http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>, Dikunjungi pada tanggal 4 April 2015

UNDP Myanmar, " *Procurement* ",
<http://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/operations/procurement.html>, diakses pada 10 Juni 2015

UNDP Thailand, *Thailand Towards a corrupt free public procurement system*,
<http://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/presscenter/pressreleases/2015/01/07/undp-helps-thailand-towards-a-corrupt-free-public-procurement-system.html>, diakses pada 10 Juni 2015

